

LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)

TAHUN ANGGARAN 2024



DINAS PERINDUSTRIAN DAN
KETENAGAKERJAAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dapat terselesaikan.

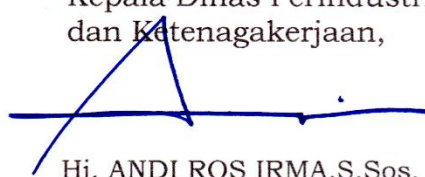
Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu pelaksana kegiatan dan bekerja secara maksimal guna tercapainya seluruh target yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 walaupun masih terdapat kekurangan disebabkan adanya kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan.

Semoga LAKIP Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dapat bermanfaat terutama untuk bahan evaluasi bagi yang berwenang untuk menilai kinerja staf dalam Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, 6 Januari 2025

Kepala Dinas Perindustrian
dan Ketenagakerjaan,



Hj. ANDI ROS IRMA, S.Sos.
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP. 19701001 199203 2 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG..... 1

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN..... 2

1.3. GAMBARAN UMUM OPD 2

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA..... 11

2.1.RENCANA STRATEGIS 11

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA 20

2.3. RENCANA KERJA TAHUN 2024 25

2.4.PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 38

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 40

3.1. PENGUKURAN KINERJA..... 40

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 41

3.3.REALISASI KEUANGAN..... 50

BAB IV PENUTUP..... 65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana tugas dan fungsinya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati, Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan fungsi perumusan dan menentukan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian dan Ketenagakerjaan

Pelaksanaan fungsi kelembagaan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan telah menerapkan dan melaksanakan Renstra ,RPJMD, RKPD serta Renja Provinsi/Kabupaten. Sistem manajemen pemerintahan sudah harus berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam peningkatan akuntabilitas, setiap rencana kinerja didasarkan pada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, program dan kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang berorientasi kesejahteraan masyarakat, dan mampu merespon setiap isu permasalahan strategis yang muncul, serta anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Untuk kinerja kegiatan capaian program harus terjabarkan dalam LAKIP sehingga akan dapat diketahui dari target dan capaian kinerja tahun berjalan. Laporan kinerja berisikan rencana, target, capaian dan realisasi terhadap pengelolaan keuangan Perangkat Daerah (PD) sehingga dari capaian tersebut dapat terukur dan terevaluasi realisasi pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang laporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap akhir tahun anggaran harus menyampaikan Laporan akuntabilitas Keuangan kepada Pemerintah Daerah (Bupati).

LAKIP Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan tetap mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/2003 baik sistematika penulisan maupun substansinya.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Tahun 2023/24 sesuai dengan Permenpan no. 53 tahun 2014 adalah :

1. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi I;
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
3. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, melalui dari saat penyusunan kedalam Dokumen Renstra hingga penjabaran ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja).

Adapun tujuan dari laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan dalam rangka mengimplementasikan kinerja yang telah ditetapkannya dalam bentuk program dan kegiatan sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian dan kekurangannya untuk dievaluasi. Sehingga menjadi dasar bagi peningkatan kegiatan untuk tahun yang akan datang sekaligus informasi ini dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat yang memerlukan.

1.3 GAMBARAN UMUM OPD

Dinas Perinnaker sebagai instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki gambaran berikut:

- a) Peringkat : B
- b) Alamat : Jalan Kihajar Dewantara No.2 Benteng
- c) Email : disperinnakerselayar@gmail.com
- d) Telp Kantor : -
- e) Titik koordinat : S 6,118712, E 120,462089
- f) Foto kantor



1.3.1 SUMBER DAYA APARATUR

a. Keadaan Pegawai

Keadaan Pegawai Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan jabatan Tahun 2024 sebagai berikut :

• JPTP	= 1 orang
• Administrator (Kelas 12)	= 1 orang
• Administrator (Kelas 11)	= 2 orang
• Pengawas	= 4 orang
• Pelaksana	= 12 orang
• Fungsional	= 5 orang
• <u>Tenaga Kontrak</u>	= <u>28 Orang</u>
Jumlah	= 53 orang

Untuk mengetahui sumber daya Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar, berikut disajikan tabel 1.1

Tabel 1.1 Susunan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan

Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan komposisi golongan dan eselon

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Strata Dua (S2)	4 orang
2	Strata Satu (S1)	33 orang
3	Diploma 3 (D3)	3 orang
4	Diploma 1(D1)	1 Orang
5	SLTA	11 orang
6	SD	1 Orang

Sumberd data : Data Subbagian Umum. Kepegawaian dan Hukum Disperinnaker Tahun 2024

Berdasarkan komposisi aparatur tersebut terlihat bahwa pendidikan aparatur Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan beragam serta menyesuaikan dengan tugas dan fungsi yang diemban masing-masing pihak. Untuk meningkatkan kinerja pegawai diberikan beberapa pelatihan dan pengembangan kompetensi. Adapun komposisi pejabat struktural dan Fungsional diuraikan dalam tabel 1.2 dan tabel 1.3.

Tabel 1.2 Jumlah Pejabat Struktural pada Tahun 2024

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 Orang
2	Sekertaris	1 Orang
3	Kasubag	4 Orang
4	Kabid	2 Orang
5	Kepala Unit BLK	1 Orang
	Jumlah	9 Orang

Sumberd data : Data Subbagian Umum. Kepegawaian dan Hukum Disperinnaker Tahun 2024

Tabel 1.3 Jumlah Pejabat Fungsional pada Tahun 2024

No.	Diklat Penjenjangan	Jumlah
1	Pengantar Kerja	2 Orang
2	Analisis Kebijakan	1 Orang
3	Instruktur Madya	1 Orang
4	Instruktur Penyelia	1 Orang
	Jumlah	5 Orang

Sumberd data : Data Subbagian Umum. Kepegawaian dan Hukum Disperinnaker Tahun 2024

1.3.2 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris terdiri dari;
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perindustrian;
4. Bidang Ketenagakerjaan;
5. Kelompok Jabatan Pelaksana;
6. Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Kepala Dinas Perinnaker mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian dan Ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Perindustrian dan Ketenagakerjaan;
- b. pelaksanaan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Ketenagakerjaan;
- c. pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perindustrian dan Ketenagakerjaan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsi

Uraian tugas kepala dinas, meliputi :

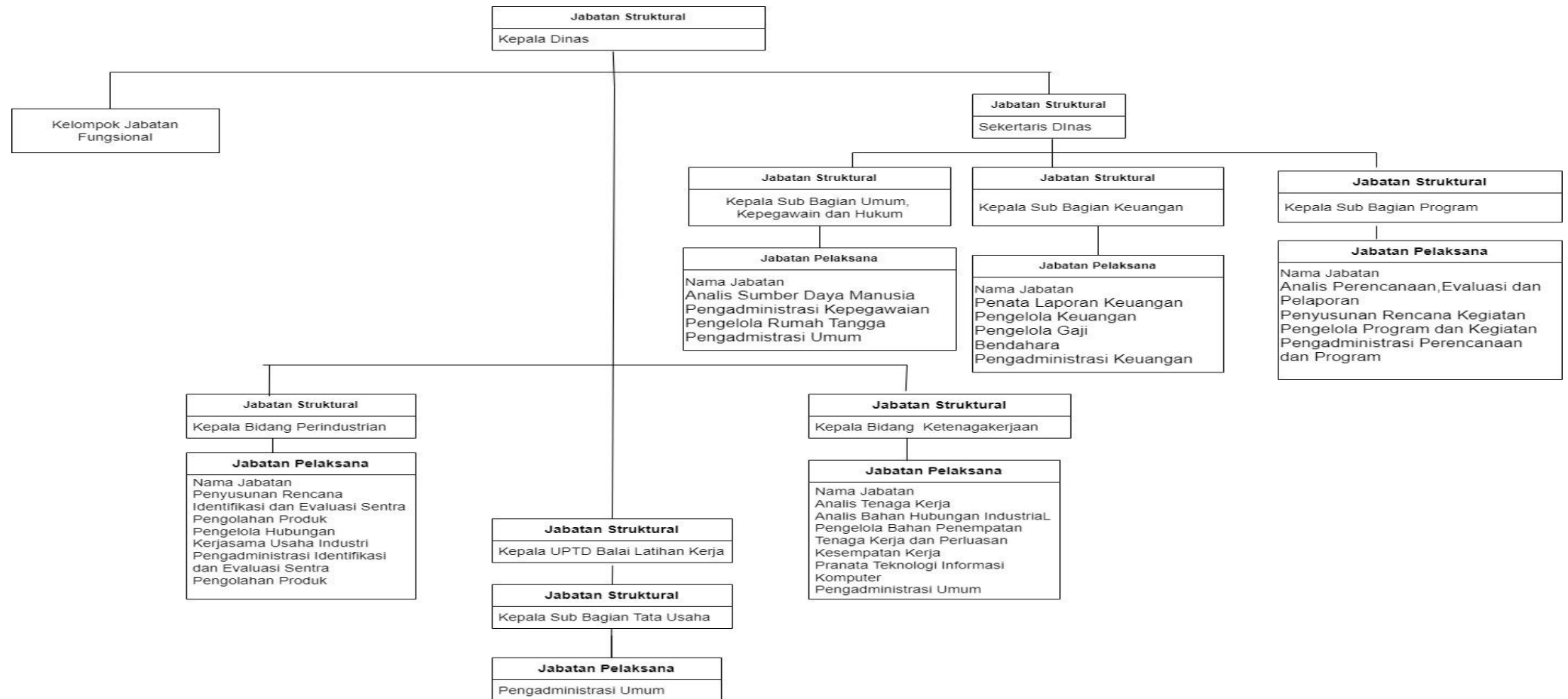
- a. menyusun rencana kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan

pelaksanaan tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memarat dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyelenggarakan evalausi dan pelaporan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian dan Ketenagakerjaan;
- g. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis tenaga kerja;
- h. menyelenggarakan kebijakan sesuai lingkup tugasnya;
- i. menyelenggarakan evlauasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. menyelenggarakan administrasi dinas sesuai lingkup tugasnya;
- k. mengkordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis Bidang Perindustrian dan Ketenagakerjaan;
- l. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nono pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- m. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atas sebagai perumusan kebijakan;dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atassan sesuai dengan bidang tugasnya.

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN



1.4 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas sebagaimana tertera pada tabel 1.4 berikut ini :

Data Asset dan Kondisinya
Dinas Perinnaker Kab. Kepulauan Selayar
Per Desember 2024

No	Jenis Perlengkapan	Kondisi		Jumlah	Tahun Perolehan
		Baik	Rusak		
1.	Papan Nama Kantor	1	-	1	2024
2.	Speaker	1	-	1	2024
3.	Scanner	1	-	1	2024
4.	Cermin	4	-	4	2024
5.	Tanah	3	-	3	2022,2024
6.	Mobil	1	-	1	2015
7.	Kursi Kerja Pejabat	10	-	10	2018,2022,2023
8.	Kursi Putar	1	-	1	2017
9.	Kursi Rapat	10	-	10	2018
10.	Kursi Tamu Kayu	1	-	1	2024
11.	Meja Kerja	11	-	11	2012,2014,2016,2017,2023
12.	Meja ½ Biro	5	-	5	2017,2018,2019
13.	Televisi	1	-	1	2015
14.	LCD	1	-	1	2023
15.	AC	6	-	6	2014,2021,2023
16.	PC Komputer	5	-	5	2013,2018,2021
17.	Laptop	18	-	18	2014,2015,2016,2017,2019, 2020,2023,2024
18.	Notebook	4	-	4	2021
19.	Printer	10	-	10	2017,2018,2020,2023,2024
20.	Meja Rapat	2	-	2	2024
21.	Alat Penguji Kendaraan	123	-	123	2018
22.	Global Positioning System (GPS)	1	-	1	2014

No	Jenis Perlengkapan	Kondisi		Jumlah	Tahun Perolehan
		Baik	Rusak		
23.	Perlengkapan Bengkel Kayu	33	-	33	2018
24.	Perkakas Bengkel Kerja	123	-	123	2018
25.	Perkakas Bengkel Kayu	78	-	78	2018
26.	Mesin Las	5	-	5	2016
27.	Mesin Gerinda	5	-	5	2016
28.	Mesin Bor	7	-	7	2016
29.	Lemari Arsip	3	-	3	2018,2022,2023
30.	Kamera Digital	1	-	1	2015
31.	Handy Talkie	1	-	1	2014
32.	Tanah	3	-	3	1905,2004,2022,2024
33.	Bangunan	3	-	3	1998,2011,2018,2022,2024
34.	Motor	6	-	6	2008,2014,2016,2017,2019,2021

Sumber data : Subag Umum, Disperinnaker Kab. Kepulauan Selayar Desember 2024

Berdasarkan jumlah perlengkapan yang tersedia sebagaimana gambaran dalam tabel tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa jumlah dan kualitas perlengkapan pada Dinas Perindustrian Kabupaten Kepulauan Selayar sudah *representative* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

1.5 ISU-ISU STRATEGIS

Beberapa permasalahan utama pada dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Ketersediaan lahan yang dimiliki pemerintah daerah masih terbatas;
2. Masih kurangnya investasi industri besar dan menengah;
3. Rendahnya tingkat pendidikan kader IKM yang menyebabkan kesulitan mengadopsi IPTEK;
4. Keterbatasan Petugas yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pemberdayaan IKM;
5. Masih rendahnya pertumbuhan IKM aktif berproduksi;
6. Belum efektifnya penggunaan Sistem SIINAS Kab. Kepulauan Selayar;
7. Masih banya IKM yang memerlukan bantuan fasilitas dalam mengembangkan usahanya;
8. Masih rendahnya penyerapan tenaga kerja;
9. Masih rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja;
10. Masih rendahnya tingkat kepesertaan BPJS;
11. Belum optimalnya kualitas hubungan antara perusahaan dan tenagakerja;
12. Masih rendahnya tingkat penyelesaian hubungan industrial;
13. Belum disusunnya rencana tenagakerja mikro oleh perusahaan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang jelas dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Tahun 2021-2026. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang dijabarkan dalam kebijakan dan program.

Visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih merupakan landasan perumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan dalam RPJPD. Mengingat visi, misi, dan program kepala daerah merupakan hasil proses politik terpilihnya Kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh masyarakat, maka visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dijadikan sebagai substansi dan rujukan utama penyusunan RPJMD. Namun demikian, demi mendapatkan dokumen perencanaan yang baik, *manageable*, dan selaras dengan manajemen pemerintahan daerah, maka visi dan misi tersebut perlu dikembangkan dan dijabarkan sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, agar tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun dapat dijabarkan secara efektif dalam mencapai tujuan utama pembangunan daerah.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah (saat mencalonkan) adalah bagaimana menyesuaikannya dengan sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode berkenaan. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok yang sama, kepemimpinan yang berbeda dapat

menghasilkan visi dan misi yang berbeda pula, tergantung tekanan dan prioritas pembangunan masing-masing. Dengan demikian maka kedudukan RPJMD sangat penting untuk dijadikan landasan penyusunan dokumen RENSTRA SKPD yang dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Mengacu pada uraian di atas serta memperhatikan arah kebijakan tahun ketiga dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 Selayar, RPJPD dan RPJM Propinsi Sulawesi Selatan 2019-2024, substansi RPJM Nasional 2015-2019, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Kepulauan Selayar, serta visi misi Bupati/Wakil Bupati, maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2021-2026 sebagai gambaran realitas masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan adalah :

**“Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan
Timur Indonesia”**

Dalam rumusan visi ini merujuk langsung pokok yakni “Bandar Maritim”. adalah perwujudan visi yang hendak dicapai, “Kawasan Timur Indonesia” adalah wilayah yang menjadi dampak distribusi ke Wilayah Timur Indonesia dalam pencapaian perwujudan visi Sentral logistik.

“Bandar Maritim” seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri.

Kawasan Timur Indonesia menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Visi “Bandar Maritim” merupakan gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran berikut ini:

- ii. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Pusat Distribusi Logistik”

- iii. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata”
- iv. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Industri Perikanan Terpadu”

Harapan terwujudnya Visi “Bandar Maritim” pada tahun 2026, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah dengan indikator capaian dimulai pada tahun 2026, sebagai berikut:

- 1. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;
- 2. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
- 3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta menjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan
- 4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dijalankan pada 2021-2026 adalah:

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas;

2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Pedesaan

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan capaian klasifikasi dan kualifikasi desa menuju, serta segenap upaya peningkatan ekonomi berbasis desa;

3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik;

4. Meningkatkan Pengelolaan Potensi Kelautan;

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki;

5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan;

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah.

6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan hidup

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah terdegradasi.

Visi Bandar Maritim ditopang oleh program prioritas pembangunan yaitu tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan. Program Prioritas tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Distribusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT); dan
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Program Pembangunan Daerah yang akan digunakan dalam mewujudkan Visi Bandar Maritim tersebut, akan diwujudkan pada tiap kawasan pengembangan, yaitu :

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, didukung oleh 5 (lima) sub kawasan, yaitu : (a). Sub Kawasan Utama pada Kawasan Pelabuhan Benteng; (b). Sub Kawasan 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi; (c). Sub Kawasan 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng-Jampea;

- (d). Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate; dan (e). Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.
2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Pasi–Gusung, didukung oleh 7 (tujuh) sub kawasan, yaitu : (a). Sub Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang; (b). Sub Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya; (c). Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang; (d). Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang; (e). Sub Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi; (f). Sub Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi; dan (g). Sub Kawasan 7 pada Kawasan Pulau Panjang.
3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, didukung oleh 5 (lima) sub sentra, yaitu : (a). Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang; (b). Sub Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi; (c). Sub Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea; (d). Sub Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate; dan (e). Sub Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI merupakan Program Unggulan sebagai penguat atau sebagai penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Gerbangsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan status desa dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, maka dapat diidentifikasi bahwa kontribusi Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan dalam pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

Misi ke 1 : “Mengembangkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan”

Tujuan : Mewujudkan reformasi birokrasi (T-1)

Sasaran : Meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan (S-1)

Strategi:

1. Menyediakan data dan laporan yang akuntabel dan tepat waktu;
2. Meningkatkan SDM yang profesional;
3. Menyiapkan sarana dan prasarana yang meningkatkan kinerja

Kebijakan :

1. Menyusun data dan laporan yang akuntabel dan tepat waktu
2. Mengikutkan Pendidikan dan pelatihan aparatur yang membutuhkan peningkatan profesionalisme
3. Melakukan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang kinerja

Misi ke 2 : “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan”

Tujuan : Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Sasaran : Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Tenaga Kerja

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Hubungan Kerja antara Tenaga Kerja dan Perusahaan

Strategi : 1. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas dan daya saing tenaga kerja

2. Meningkatkan Upaya penyebaran dan informasi kesempatan kerja

3. Meningkatkan perluasan dan kesempatan kerja melalui fasilitasi rekrutmen tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja pada Perusahaan terkait antar daerah, luar negeri maupun sektor kewirausahaan.

4. Meningkatkan harmonisasi hubungan industrial, peningkatan fungsi LKS tripartite, peningkatan sarana hubungan industrial, kesejahteraan tenaga kerja, kelembagaan organisasi serikat pekerja, kelembagaan bipartit dan penetapan upah minimum.

Kebijakan : 1. Perindustrian dapat didorong menjadi motor penggerak perekonomian

1. Mengarahkan perusahaan menyusun dokumen rencana tenaga kerja yang akuntabel

2. Menyediakan tenaga kerja yang berkompetensi produktif dan berkelanjutan sesuai kebutuhan pasar kerja

3. Peningkatan perluasan dan melalui antar daerah dan luar negeri serta mendorong tumbuh kembangnya wirausaha baru

4. Pengembangan standar kompetensi tenaga kerja yang mengacu standar kebutuhan industri/Perusahaan, pengembangan kurikulum, penyediaan instruktur yang kompeten dan penyediaan informasi pasar kerja

5. Peningkatan hubungan industrial agar kondisi hubungan kerja dapat diciptakan keserasian dan keseimbangan hak dan kewajiban serta pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja yang didasarkan pada ketentuan yang berlaku
6. Penyempurnaan penyelesaian ketenagakerjaan, diupayakan melalui upaya pencegahan dan membatasi kasus-kasus ketenagakerjaan dengan pemberian bimtek penyuluhan serta percepatan penanganan kasus dengan didasarkan pada keadilan.

Misi ke 4 : “ Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman”

Tujuan : Meningkatkan Usaha Pariwisata

Sasaran : Meningkatnya Penadapatan Masyarakat Pelaku Usaha

- Strategi : 1. Mengembangkan Usaha Industri
2. Penyediaan Lahan yang dimiliki oleh pemerintah
 3. Meningkatkan Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB

- Kebijakan: 1.Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri
2. Penggunaan Sistem Informasi Nasional
 3. Sosialisasi PERDA RPIK Tahun 2019

Tabel.2.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, Renstra Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

Visi		: Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan TimurIndonesia		
Misi 1		: Mengembangkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1	Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah	Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil Meningkatnya kapabilitas dan keunggulanSDM aparatuyang ditunjang perangkat Teknologi informasi maupun meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang undangan	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur

Misi 2		: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Pedesaan		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
2	Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	1.Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenagakerja	1. Meningkatkan kompetensi dan roduktivitas dan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan tenaga kerja 2. Meningkatkan upaya penyebarluas an dan informasi kesepatan kerja melalui penyebarluas an informasikerja. 3.Meningkatkan Perluasan dan kesempatan kerja Melalui fasilitasi rekrutmen tenaga Kerja dan Penempatan tenaga kerja pada perusahaan terkait antar Daerah, luar negeri maupun Sektor Kewirausahaan	

Visi		: Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia		
Misi 2		: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Pedesaan		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
2	Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	1. Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	3. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas dan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan tenaga kerja 4. Meningkatkan upaya penyebaran informasi kesempatan kerja melalui penyebaran informasi kerja. 5. Meningkatkan perluasan dan kesempatan kerja melalui fasilitasi rekrutmen tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja pada perusahaan terkait antar Daerah, luar negeri maupun sektor kewirausahaan	1. Mengarahkan Perusahaan untuk Menyusun rencana tenaga kerja 2. Menyediakan tenaga kerja yang berkopetensi produktif dan Berkelanjutan sesuai kebutuhan pasar kerja melalui optimalisasi BLK . 3. Memaksimalkan program <i>Mobile Training (MTU)</i> BLK untuk mengembangkan kompetensi masyarakat desa 4. Pengembangan standar kompetensi tenaga kerja yang mengacu standar kebutuhan industri/ perusahaan, pengembangan kurikulum, penyediaan instruktur yang Kompeten dan penyediaan informasi kerja 5. Penyediaan Informasi pasarkerja Online 6. Peningkatan perluasan dan melalui Antar daerah dan luar negeri serta mendorong tumbuh kembangnya wirausaha baru. 7. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek) Melalui Proram G-SMS
		2. Meningkatnya kualitas hubungan kerja antara tenaga kerja dan perusahaan	Meningkatkan harmonisasi Hubungan Industrial, Peningkatan Fungsi LKS Tripartit, Peningkatan sarana hubungan industrial, Kesejahteraan tenaga kerja, kelembagaan organisasi serikat pekerja, Kelembagaan Bipartit dan penetapan upah minimum.	1. Meningkatkan pembinaan, perusahaan dengan menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan) 2. Penyempurnaan Penyelesaian Ketenagakerjaan, diupayakan melalui upaya pencegahan dan membatasi kasus-kasus ketenagakerjaan, dengan pemberian bimtek penyuluhan serta percepatan penanganan kasus dengan didasarkan pada keadilan.

Visi		: Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia		
Misi 4		: Mengembangkan pengelolaan potensi kemaritiman.		
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
3	Meningkatkan Usaha Pariwisata	Meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha	1. Perwujudan Komsumen berdaya dan pelaku usahayang bertanggungjawab 2.Peningkatan Kualitas kelembagaan produktivitas, daya saing dan kemandirian IKM	1. Mengoptimalkan dukungan terhadap pengembangan produk lokal 2. Meningkatkan produk unggulan daerah 3.Meningkatkan promosi dan pengembangan usaha pelaku IKM

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Mewujudkan pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka Dinas Perinnaker perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur tujuan dan sasaran strategis pemerintahan daerah dan OPD. IKU menggambarkan target pencapaian indikator OPD sesuai *core business* OPD terkait dan tertuang dalam dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama organisasi.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Disperinnaker Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 -2026 sebagai berikut:

2.2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN

Tugas Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan umum, perindustrian dan ketenagakerjaan, sedangkan fungsinya adalah melaksanakan perumusan dan menentukan kebijakan teknis di bidang

perindustrian sebagaimana visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar serta menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Kementrian sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2021-2026

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (T-C.25)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		B	BB	BB	A
		Meningkatkan epercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		61,06	66,06	70,06	74,06
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat daerah		70	75	80	85
			Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia		Rasio Kesempatan kerja	0,98%	0,98%	0,99%	0,99%	0,99%
		Meningkatnya daya saing dan produktivitas Tenaga kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2,75%	3,75%	5,00%	6,50%	8,00%
			Tingkat Produktivitas tenaga kerja	54,00%	56,00%	59,00%	62,00%	65,00%
		Meningkatnya kualitas hubungan kerja antara tenaga kerja dan perusahaan	Persentase penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	42,50%	45,00%	47,50%	50,00%	52,50%
3	Meningkatkan Usaha Pariwisata		Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	4,76	5,59	6,41	7,24	8,07
		Meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha	Persentase Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah	1.300	1.350 (3,70)	1.400 (7,14)	1.450 (10,34)	1.500 13,33

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target 2024	Formula
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja	18%	<i>Jumlah IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja /Jumlah seluruh IKM X 100%</i>
2	Persentase Izin Pelaku IKM yang telah memiliki PIRT	30%	<i>Jumlah IKM yang memiliki PIRT/Jumlah seluruh IKM X 100%</i>
3	Persentase IKM yang terdaftar pada sistem informasi nasional	45%	<i>Jumlah IKM Yang terdaftar pada SIINAS/Jumlah seluruh IKM X 100%</i>
4	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	75%	<i>Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD / jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota X100%</i>
5	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1.5%	<i>Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi / Jumlah tenaga kerja keseluruhan X100%</i>
6	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	31,5%	<i>Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan/ Jumlah pencaker yang terdaftar X100%</i>
7	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	1,17%	<i>Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak / Jumlah perusahaanX100%</i>

Tabel 2.4.
Indikator Kinerja yang mengacu pada TPB/SDGs (T-C.28)
DINAS PERINNAKER Tahun 2021-2026

No.	Indikator		Persentase Capaian (%)				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Pilar Pembangunan Sosial						
	Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan						
	1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.					
	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	43,31%	44,57 %	47,21%	48,58 %	50%
	Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi						
	8.3.	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.					
	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	52,68%	53,49%	54,32%	55,15	56,00%
		Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.					
	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	20%	22%	24%	26%	26%
	Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan						
	Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan						
	10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.					
	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	43,31%	44,57 %	47,21%	48,58 %	50%

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formula
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	- Nilai Perencanaan Kinerja - Nilai Pengukuran Kinerja - Nilai Pelaporan Kinerja - Nilai Evaluasi Internal
		Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur/Total Unsur yang terisi X Nilai Penimbang
		Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Kesesuaian Laporan Keuangan Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010
2	Meningkatnya Daya Saing dan Prdoduktivitas Tenaga Kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja/Jumlah Perusahaan
		Tingkat Produktivitas tenaga kerja	Total output / Total pekerja
3	Meningkatnya Kualitas Hubungan kerja antara tenaga kerja dan Perusahaan	Persentase penyelesaian perselisihan Hubungan Indutrial	Jumlah Kasus terselesaikan tahun n / Jumlah Kasus Terdaftar tahun n X 100% =
		Persentase kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga kerja peserta BPJS Naker/ Jumlah Tenaga Kerja X 100% =
4	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Pelaku Usaha	Persentase Pertumbuhan industri kecil dan menengah tahun 2024	Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2024- jumlah industri kecil dan menengah tahun 2022/ jumlah industri kecil dan menengah tahun 2024 X100%

2.4 RENCANA KERJA TAHUN 2024

Berdasarkan Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2024 telah ditetapkan 9 sasaran dengan dukungan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan sebagai salah satu Stratejik pencapaian sasaran. Rincian sasaran berikut indikator kinerja, satuan dan targetnya dapat dilihat pada tabel Rencana Kinerja 2024.

Guna mengarahkan pencapaian secara efektif, maka disusunlah program dan kegiatan yang implementasinya diatur melalui kebijakan/*policy* yang ditetapkan oleh pimpinan. Strategi pencapaian sasaran tersebut dijelaskan untuk masing-masing sasaran.

Sasaran ini dilaksanakan melalui kebijakan mendorong pemerintahan yang dapat mengefektifkan pelaksanaan otonomi daerah dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

RENCANA KERJA TAHUNAN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Anggaran
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja (%)	100%	Rp.3.320.399.600,-
	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP		Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)	88,00%	
			a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp. 10.465.000,-
			1) Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	Rp. 1.975.300,-
			2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	Rp. 2.125.800,-
			3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dok	Rp. 1.661.500

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Anggaran
				Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
			4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	Rp. 2.574.500,-
			5) Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	Rp. 1.206.600
			6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	Rp. 912.400,-
			b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	Rp. 2.392,750.000,-
			1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	30 Orang/bulan	Rp. 2.372.600.000,-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Anggaran
			2) Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Dok	Rp. 2.000.000,-
			3) Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/ semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ semesteran yang tersedia	12 lap	Rp. 15.878.900,-
			4) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Pengeloan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksanaan	1 Laporan	Rp.2.271.100,-
			c.Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp.443.382.100,-
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan	7 Paket	Rp.64.845.100,-
			Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	4Paket	Rp.20.000.000,-
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	1 Lap	Rp.358.537.000,-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Anggaran
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
			d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Rp.276.352.400,-
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	Rp.83.939.100,-
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	Rp.192.413.300
			e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	Rp.30.000.000
			1) Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	Rp.30.0000.000
			f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	Rp.167.450.000,-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Anggaran
			Daerah	penunjang urusan pemerintah daerah		
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	Rp.50.910.000,-
			2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara	9 Unit	Rp.5.970.000,-
			3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	Rp.110.570.000,-
2	Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil dan Menengah		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja	18%	Rp. 3.607.352.400,-
			Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi	100%	Rp. 3.607.352.400,-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Anggaran
				Pembangunan Industri Kab/Kota		
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dok	Rp.50.264.400,-
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3 Dok	Rp.1.484.328.000,-
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	9 Dok	Rp.1.972.760.000,-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Anggaran
			Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1 Dok	Rp.100.000.000,-
	Meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terdaftar pada Sistem Informasi nasional	45%	Rp.56.606.000,-
			Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	Rp.56.606.000,-
			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data	1 Dokumen	Rp.56.606.000,-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Anggaran
			Informasi Industri Nasional (SIINas)	Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)		
4	Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi (%)	1.5%	Rp.857.936.000,-
		Tingkat Produktivitas tenaga kerja		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	59%	
			Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	100%	Rp.857.936.000,-
			Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada tahun n	52 Orang	Rp.142.784.000,-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Anggaran
			Koordinasi Lintas lembaga dan Kerja sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah kesepakatan/ koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana	1 Lembaga	Rp.692.530.000,-
			Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada perusahaan kecil	100%	Rp.22.622.000,-
			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	6 Perusahaan	Rp.22.622.000,-
			Program Penempatan Tenaga Kerja,	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	31,5%	Rp.22.266.000,-
			Kegiatan Pelayanan Antarakerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pelayanan antar kerja di daerah kab/kota	100%	Rp.22.266.000,-
			Pelayanan Antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	50 Orang	Rp.22.266.000
5	Meningkatnya kualitas hubungan kerja	Persentase penyelesaian	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang Menerapkan tata	1,17%	Rp.1.220.000.000,-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Anggaran
	antara tenaga kerja dan perusahaan	perselisihan Hubungan Industrial		kelola perusahaan yang layak		
		Persentase kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	Kegiatan Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk yang memepunyai wilayah kerja lebih dari 1(satu) Kab/Kota	Persentase terlaksananya Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk yang memepunyai wilayahbkerja lebih dari 1(satu) Kab/Kota	100%	Rp. 20.000.000,-
			Pengesahan Peraturan Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar diWLKP Online (Perusahaan)	2 Perusahaan	Rp.20.000.000,-
			Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepntingan di 1 (satu) daerah provinsi	Persentase terlaksanya Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/	100%	Rp. 1.200.000.000,-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Anggaran
				berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah provinsi		
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB,Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	6.000 orang	Rp.1.200,000.000,-

2.5 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah :

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Berikut ini diuraikan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan selama tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formula
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	- Nilai Perencanaan Kinerja - Nilai Pengukuran Kinerja - Nilai Pelaporan Kinerja - Nilai Evaluasi Internal
		Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur / Total Unsur yang terisi X Nilai Penimbang
		Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Kesesuaian Laporan Keuangan Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010
2	Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja / Jumlah Perusahaan
		Tingkat Produktivitas tenaga kerja	Total output / Total pekerja
3	Meningkatnya Kualitas Hubungan	Persentase penyelesaian perselisihan Hubungan Indutrial	Jumlah Kasus terselesaikan tahun n / Jumlah Kasus Terdaftar tahun n X 100% =

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formula
(1)	(2)	(3)	(4)
	kerja antara tenaga kerja dan Perusahaan	Persentase kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga kerja peserta BPJS Naker/ Jumlah Tenaga Kerja X 100% =
4	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Pelaku Usaha	Persentase Pertumbuhan industri kecil dan menengah tahun 2024	Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2024- jumlah industri kecil dan menengah tahun 2022/ jumlah industri kecil dan menengah tahun 2024X100%

PROGRAM KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.3.320.399.600,-
2.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 3.607.352.400-
4.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp.56.606.000,-
5.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 857.936.000,-
6.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 22.266.000,-
7.	Program Hubungan Industrial	Rp.1.220.000.000,-
	TOTAL	Rp.9.084.560.000,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja pada tahun 2023.

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi Tahun 2024} - \text{Target 2022}}{\text{Realisasi Tahun 2024}} \times 100\%$$

Untuk indikator “persentase pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin” menggunakan cara perhitungan yang berbeda karena semakin kecil capaian, semakin baik kinerja yang dicapai.

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Predikat nilai capaian indikator skala pengukuran dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 91	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran capaian perjanjian kinerja tahun 2024 menggambarkan target yang harus dipenuhi Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formula
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	- Nilai Perencanaan Kinerja - Nilai Pengukuran Kinerja - Nilai Pelaporan Kinerja - Nilai Evaluasi Internal
		Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur/Total Unsur yang terisi X Nilai Penimbang
		Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Kesesuaian Laporan Keuangan Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010
2	Meningkatnya Daya Saing dan Prdoduktivitas Tenaga Kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja/Jumlah Perusahaan
		Tingkat Produktivitas tenaga kerja	Persentase PDRB/Jumlah Tenaga Kerjax100%
3	Meningkatnya Kualitas Hubungan kerja antara tenaga kerja dan Perusahaan	Persentase penyelesaian perselisihan Hubungan Indutrial	Jumlah Kasus terselesaikan tahun n / Jumlah Kasus Terdaftar tahun n X 100%
		Persentase kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga kerja peserta BPJS Naker/ Jumlah Tenaga Kerja X 100% =
4	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Pelaku Usaha	Persentase Pertumbuhan industri kecil dan menengah tahun 2024	Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2024- jumlah industri kecil dan menengah tahun 2022/ jumlah industri kecil dan menengah tahun 2024 X100%

Sumber Data: Dinas Perinnaker , 31 Desember 2024

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan–tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Laporan ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 4 (Empat) Sasaran Strategis dengan menggunakan 8 (Delapan) Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

1. Sasaran strategis I Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah

Tabel 3.3

Indikator Kinerja Sasaran ke-1

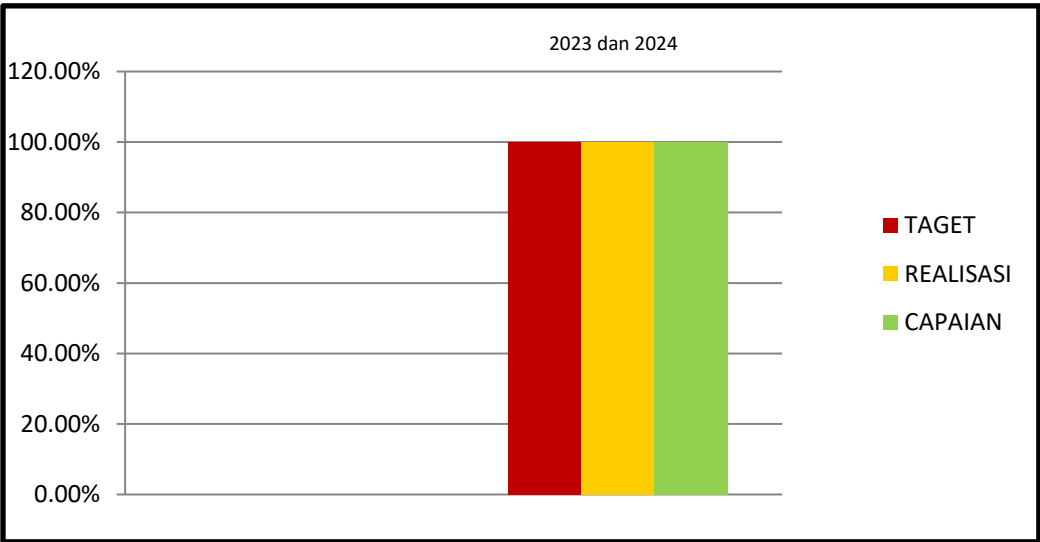
Sasaran 1	Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah		
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai SAKIP OPD	66,06	43,50	65,85%
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	83,33	111.11%
Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Sumber Data: Dinas Perinnaker , 31 Desember 2024

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap penerima layanan pada tahun 2024 memiliki target Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 75% sedangkan untuk penilaian SAKIP targetnya sebesar 66,06 % namun untuk realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2024 adalah 83,33 %, capaiannya adalah 111,11%. Sedangkan untuk penilaian SAKIP nilai realisasi 43,50%.

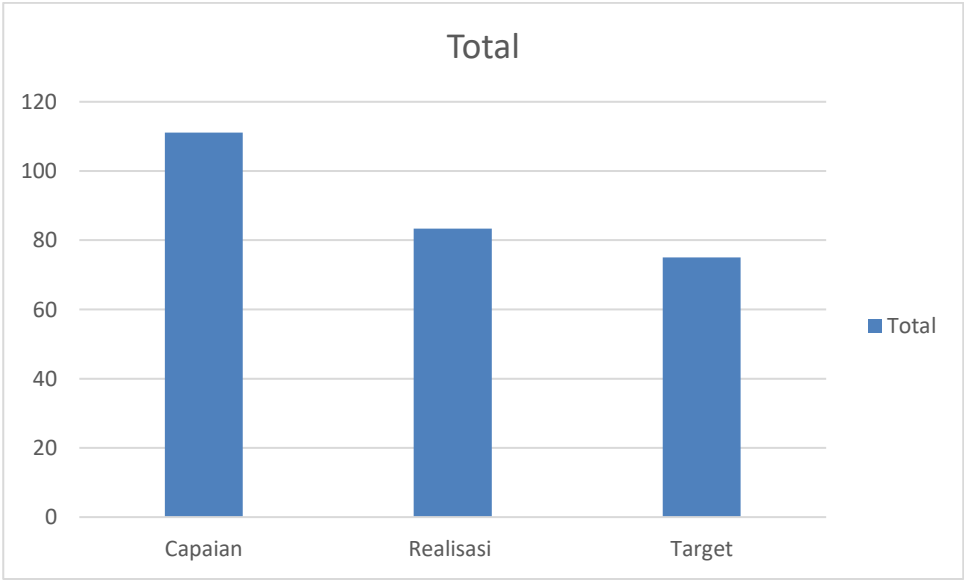
Gambar 3.1

Diagram Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)



Sumber Data: Dinas Perinnaker , 31 Desember 2024

Gambar 3.2
Diagram Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)



Sumber Data: Dinas Perinnaker , 31 Desember 2024

Upaya peningkatan kesesuaian laporan keuangan Perangkat Daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada tahun 2024 memiliki target Kinerja 70,53 % dan realisasi kinerjanya 100 % sedangkan persentase capaian kinerja keuangan memiliki target kinerja keuangan 88,00 % sedangkan realiasasi kinerja keuangannya 96,85%. Berdasarkan capaian tersebut, indikator laporan keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan SAP berada pada kategori sangat tinggi.

Faktor yang menyebabkan kategori sangat tinggi adalah penggunaan Aplikasi keuangan Sistem Informasi Perangkat daerah

(SIPD) RI, SIPD Penatausahaan, Aplikasi Monitoring dan Evaluasi dan Sumber Daya Manusia yang terus menyesuaikan dengan tujuan pembangunan daerah.

Gambar 3.3
Diagram Nilai SAKIP OPD



Sumber Data: Dinas Perinnaker, 31 Desember 2024

Peningkatan kapasitas penilaian SAKIP pada tahun 2024 memiliki target Kinerja 66,06% dan realisasi kinerjanya 43,50 % dan Capaian Kinerjanya 65,85%. Berdasarkan capaian tersebut, indikator peningkatan nilai SAKIP berada pada kategori sedang.

Faktor yang menyebabkan kategori sedang karena Penilaian SAKIP Tahun 2024 adalah realisasi Tahun 2023. Pada Tahun 2023, penilaian yang dilakukan ada pada tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kegiatan. Salah satu hasil penilaian menunjukkan belum disusun dokumen rencana aksi kegiatan dan monitoring evaluasi kinerja eselon IV, III dan II, belum disusun *Cascading* atau pohon kinerja dan belum terlihat *Croscutting* kegiatan. Namun dalam tahap pelaksanaan telah dilakukan Kegiatan rapat monitoring dan evaluasi Kinerja Per Triwulan walaupun belum disusun dokumen hasil monitoring dan evaluasi.

2. Sasaran strategis II Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Tenaga Kerja

Tabel 3.4

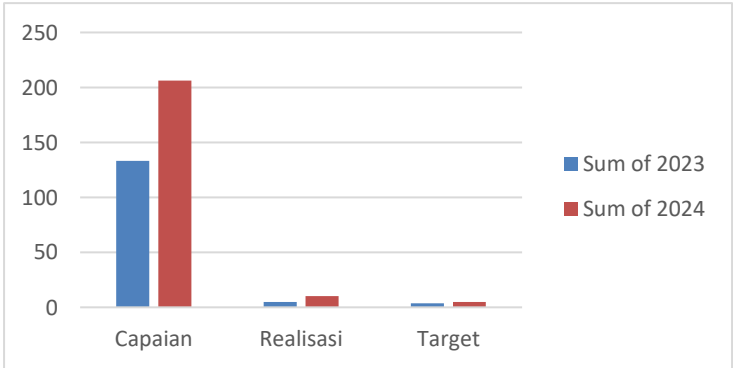
Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-2

Sasaran 2	Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Tenaga Kerja					
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Rasio daya serap tenaga kerja (%)	3,75	5	133,33%	5	10,31	206,20%
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	56	10,31	18,41%	59	43,14	73,12%

Sumber Data: Dinas Perinnaker, 31 Desember 2024

Gambar 3.4

Diagram Rasio daya serap tenaga kerja

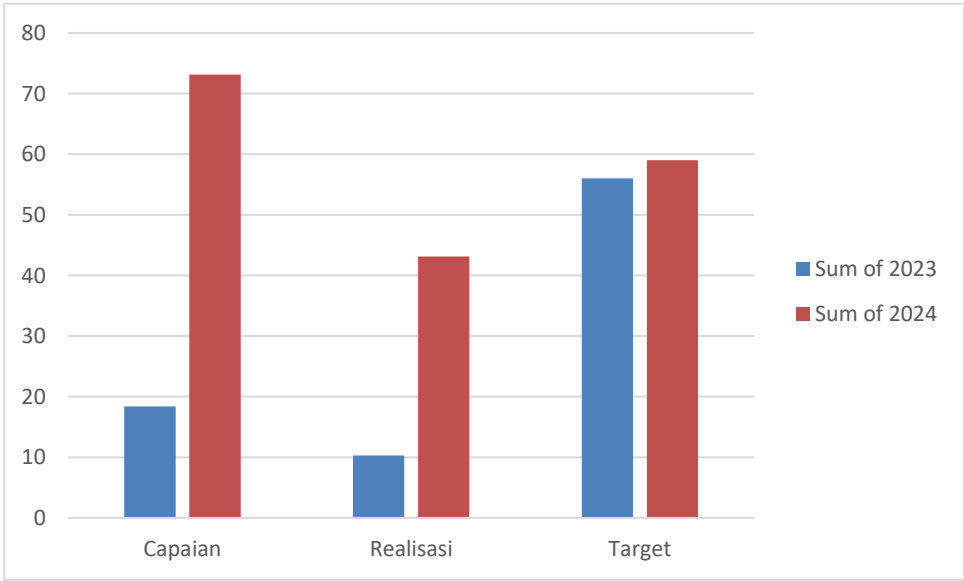


Sumber Data: Dinas Perinnaker, 31 Desember 2024

Berdasarkan target yang ditetapkan target dari Rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2024 sebesar 5% sedangkan realisasi Rasio daya serap tenaga kerja sebesar 10,31% sehingga capaian kinerja pada Tahun 2024 sebesar 202,06% berada pada kategori sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 realisasi rasio daya serap tenaga kerja mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan karena daya serap tenaga kerja dipengaruhi oleh banyaknya Perusahaan yang membuka lowongan kerja dan banyaknya tenaga kerja yang terlatih,

semakin baiknya pelayanan antar kerja dalam memfasilitasi pelayanan antar kerja. Adapun tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

Gambar 3.5
Diagram Rasio Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja



Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Tahun 2024 target kinerja 59%, realisasi kinerja 43,14 %, Capaiannya 73,12% berada pada kategori tinggi. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 capaian kinerja mengalami peningkatan yang sangat signifikan namun belum mencapai target sesuai dengan yang ditetapkan di RKPD. Pelaksanaan Pelatihan produktivitas, Pelatihan kerja dan bimbingan dan konsultasi kepada perusahaan kecil sudah dilaksanakan sehingga keterampilan pekerja dan praktek manajemen bisa lebih baik, namun teknologi juga memiliki peran dalam peningkatan produktivitas perusahaan. Namun pada kenyataan peralatan yang digunakan oleh perusahaan kecil masih tradisional.

3. Sasaran ke III Meningkatnya kualitas hubungan kerja antara tenaga kerja dan perusahaan

Tabel 3.5

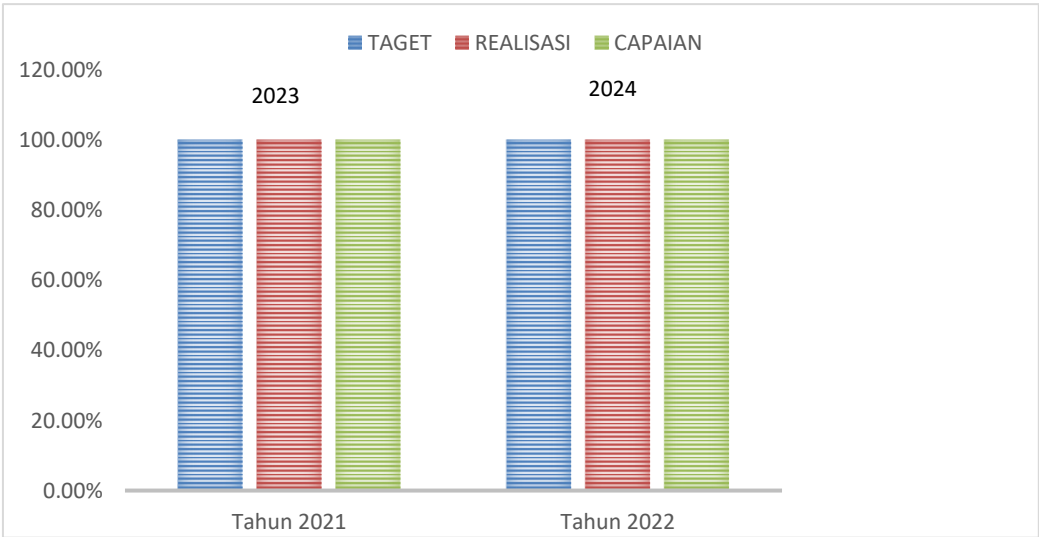
Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-3

Sasaran 3	Meningkatnya kualitas hubungan kerja antara tenaga kerja dan perusahaan					
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	100	100	100%	100	100	100%
Persentase kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	45	32,54	72,31%	47,50	36,72	77,30%

Sumber Data: Dinas Perinnaker, 31 Desember 2024

Gambar 3.6

Diagram Persentase penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial

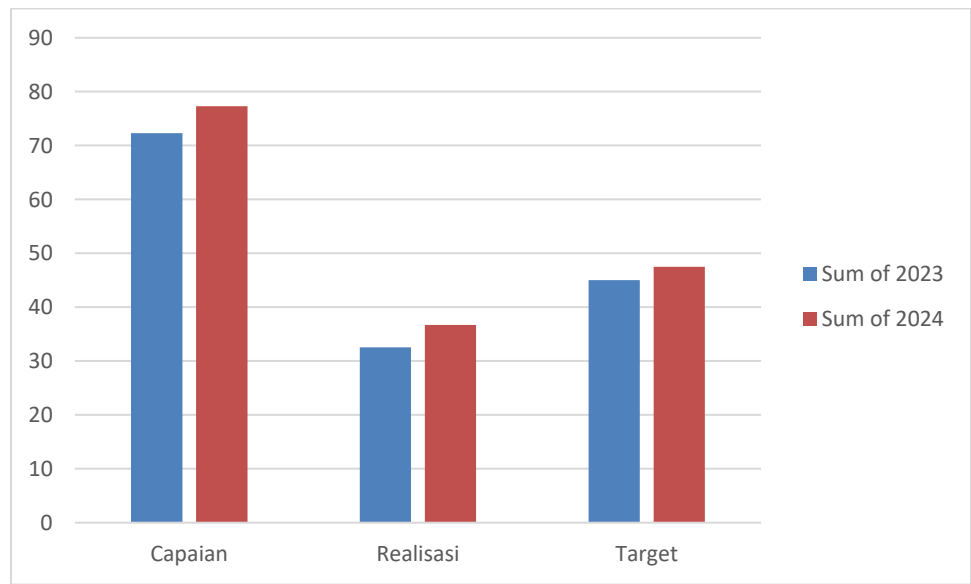


Sumber Data: Dinas Perinnaker, 31 Desember 2024

Upaya meningkatkan Persentase penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial pada Tahun 2024 memiliki Nilai Realisasi 100% dari 100% target kinerja sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%. Capaian kinerja tahun 2023 juga memperoleh capaian kinerja

sebesar 100%. Berdasarkan perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2023 bertahan di angka 100% sehingga berada pada kategori sangat baik. Pada Tahun 2024 telah dilakukan kegiatan sosialisasi peraturan perusahaan sehingga capaian kegiatannya berada pada kategori sangat tinggi. Adapun sosialisasi yang dilakukan terkait pembuatan peraturan perusahaan pada perusahaan yang sudah memenuhi persyaratan yakni memiliki 10 tenaga kerja. Terkait perselisihan pada perusahaan telah ditindak lanjuti pada pengawas ketenagakerjaan untuk ditindaki lebih lanjut.

Gambar 3.7
Diagram Persentase kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan



Sumber Data: Dinas Perinnaker, 31 Desember 2024

Indikator Kinerja Persentasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2024 dengan target 47,50% memiliki nilai realisasi 36,72 % dengan capaian kinerja 77,33%. Bila dibandingkan pada tahun 2023 persentase capaian kinerja sebesar 72,31%. Indikator Persentase penyelesaian perselisihan Hubungan Indutrial pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sehingga mencapai kategori tinggi. Pada Tahun 2024 telah membiayai pembayaran iuran JKK dan JKM bagi pekerja informal (rentan) sebanyak 7900 peserta yang dibayarkan selama 9 bulan. Kemudian telah diadakan beberapa kali rapat perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada ekosistem desa dari kepala desa sampai pemandi mayat.

4. Sasaran ke IV Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Pelaku Usaha

Tabel 3.6

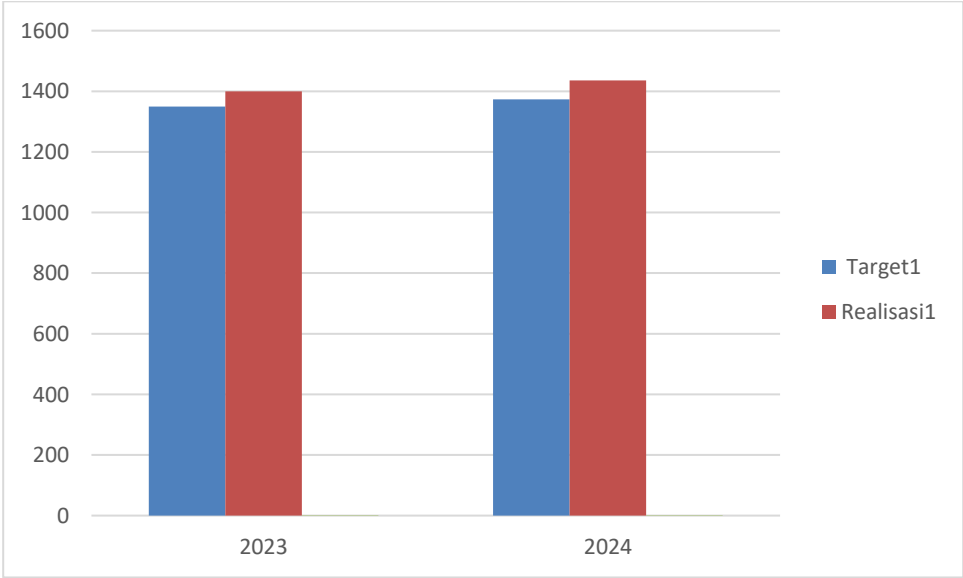
Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-4

Sasaran 4	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Pelaku Usaha					
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Pertumbuhan	Target	Realisasi	Pertumbuhan
Persentase Pertumbuh an industri kecil dan menengah	1350 (3,47)	1373	5,31%	1400 (7,14)	1436	9,47 %

Sumber Data: Dinas Perinnaker, 31 Desember 2024

Gambar 3.8

Diagram Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah



Sumber Data: Dinas Perinnaker, 31 Desember 2024

Berdasarkan persentase pertumbuhan industri Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2024 target kinerja 1400, sedangkan realisasinya adalah 1436. Pertumbuhan IKM sebesar 9,47%. Jika dibandingkan Tahun 2023, Pertumbuhan IKM mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni 4,16 % .

Untuk mendukung pencapaian kinerja beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah Sosialiasasi dan Pembentukan sentra IKM, dimana

Sentra IKM yang terbentuk sampai Tahun 2024 sebanyak 5 sentra, selain itu dilakukan Pendataan IKM melalui aplikasi SIINAS, sampai dengan Tahun 2024 terdapat 133 IKM yang terdaftar. IKM yang paling banyak terdaftar dalam aplikasi adalah Industri Produk Roti dan Kue sedangkan Industri Garment adalah industri yang paling sedikit.

Pada Tahun 2024 juga dilaksanakan Pameran Inacraft, Kriyanusa dan Jakarta Kreatif Expo yang berlokasi di DKI Jakarta, selain itu ada juga bantuan peralatan yang diberikan kepada masyarakat (Pokir). Bidang Perindustrian juga menerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik yakni Peningkatan SDM dan Daya Saing IKM, Peningkatan Kapasitas dan Pengelolaan Kelembagaan dan Pengembangan Akses Pasar dan Kemitraan IKM. Dilakukan pula pembebasan lahan industri untuk Sentra IKM Pengolahan Ikan di Desa Bontosunggu.

3.3 Realisasi Keuangan

Realisasi sasaran yang ditetapkan dapat diartikan sebagai perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahunan 2024.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Target yang akan dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 meliputi 6 Program, 13 Kegiatan, dan 30 sub Kegiatan.

1. Target kinerja sasaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.8

Target kinerja sasaran program, kegiatan, dan subkegiatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	REALISASI	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	Permasalahan	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja (%)	70,53%	100%			
				Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)	88,00%	96,85%			
					Rp.3.320.399.600,-	Rp.3.073.887.867,-	92,57%		
		Laporan Kinerja Sesuai metode SILAJARA	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			
					Rp. 10.465.000,-	Rp.9.069.200,-	86,67%		
			1) Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan, jumlah Dokumen Renstra PD yang di susun dan ditetapkan	7 Dok	7 Dok			
					Rp. 1.975.300,-	Rp.1.858.300,-	94,08 %		
			2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA pokok yang tersusun	1 Dok	1 Dok			
					Rp. 2.125.800,-	Rp.1.899.900,-	89,37%		
					1 Dok	1 Dok			
			3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	Rp. 1.661.500,-	Rp.1.302.200,-	78,37%		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	REALISASI	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	Permasalahan	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA perubahan SKPD	Jumlah Dokumen dpa Perubahan SKPD	1 Dok	1 Dok			
					Rp. 2.574.500,-	2.266.400,-	88,03%		
			5) Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dok	1 Dok			
					Rp. 1.206.600,-	Rp.975.200,-	80,82%		
			6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	3 Dok			
					Rp. 912.400,-	Rp.767.200,-	84,09%		
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
					Rp. 2.392,750.000,-	Rp.2.279.194.274	95,25%		
			1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang/bulan	23 orang/bulan			
					Rp. 2.372.600.000,-	Rp.2.259.681.773,-	95,24%		
			2) Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 laporan	1 laporan			
					Rp. 2.000.000,-	Rp.1.600.400,-	80,02%		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	REALISASI	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	Permasalahan	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
				Keuangan Akhir Tahun SKPD					
			3)Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	12 laporan	12 Laporan			
					Rp. 15.878.900,-	Rp.15.795.600,-	99,48%		
			4)Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggap pemeriksaan	Jumlah laporan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggap pemeriksaan	1 Laporan	1 laporan			
					Rp.2.271.100	Rp.2.116.500,-	93,19%		
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
					Rp.443.382.100,-	442.307.849,-	99,9%		
			1)Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	4 Paket			
					Rp.20.000.000,-	Rp.19.964.000,-	99,50%		
			2)Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 Paket	7 Paket			
					Rp.64.845.100,-	Rp64.045.100,-	100 %		
			3)Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			
					Rp.358.537.000,-	Rp.358.298.749,-	100 %		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	REALISASI	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	Permasalahan	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp.276.352.400,-	Rp.257.261.544,-			
					100%	100%			
			1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik		Rp.83.939.100,-	Rp.65.101.544,-			
					1 Laporan	1 Laporan			
			2)Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Rp.192.413.300,-	Rp.192.160.600,-	81,81%		
					1 Laporan	1 Laporan			
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp.56.880.000,-	Rp.56.855.000,-	98,39%		
					100%	100%			
			1)Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Rp.5.970.000,-	Rp.5.970.000,-	100%		
					9 Unit	21 Unit			
			2)Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp.50.910.000,-	Rp.50.885.000,-	100 %		
					5 unit	5 Unit			

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	REALISASI	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	Permasalahan	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp.30.000.000,- 100%	Rp.29.200.000,- 100%	97,33% 		
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket Rp.30.000.000,-	4 Paket Rp.29.200.000,-	 		
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Pelaku Usaha	Persentase Pertumbuhan Industri kecil dan menengah	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja	Rp. 3.607.352.400,- 18%	Rp.3.479.872.788,- 2,7%	96,47% 		
			Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100% Rp. 3.607.352.400,-	100% Rp.3.479.872.788,-	 83,94%		
			1) Koordinasi,Sinkronisasi,dan Pelaksanaan kebijakan, percepatan,pengembangan, penyebaran dan perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen Rp.50.264.400,-	1 Dokumen Rp.44.411.100,-	 96,18 %		
					2 Dokumen	2 Dokumen			

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	REALISASI	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	Permasalahan	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			2) Koordinasi,sinkronisasi,dan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Rp.1.484.328.000,-	Rp.1.460.015.500,-	96,40%		
			3) Koordinasi,Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	9 Dokumen	9 Dokumen			
					Rp.1.972.760.000,-	Rp.1.770.322.688,-	89,73%		
			4) Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen			
					Rp.100.000.000,-	Rp.98.822.500,-			
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang terdaftar pada Sistem Informasi nasional	45%	10,79%			
					Rp.56.606.000,-	Rp.56.034.000,-	98,99%		
					100%	100%			

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	REALISASI	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	Permasalahan	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.56.606.000,-	Rp.56.034.000,-	98,99%		
			1) Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	1 Dok	1 Dokumen			
					Rp.56.606.000,-	Rp.56.034.000,-	98.99%		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	REALISASI	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	Permasalahan	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatnya Daya Saing dan produktivitas tenaga kerja	Rasio daya serap tenaga kerja	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi (%)	1.5%	3.01%			
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	59%	43,14%			
					Rp.857.936.000,-	Rp.815.686.100	99,73		
		Tingkat produktivitas tenaga kerja	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	100%	100%			
					Rp.857.936.000,-	Rp.815.686.100,-	99,73%		
			1) Proses Pelaksanaan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada tahun n	52 Orang	84 Orang			
					Rp.142.784.000,-	Rp.140.158.100	99,73%		
			2) Koordinasi Lintas lembaga dan Kerja sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah kesepakatan/ koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana	1 Lembaga	1 Lembaga			
					Rp.692.530.000,-	Rp.675.528.000,-	100%		
					100%	100%			

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	REALISASI	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	Permasalahan	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada perusahaan kecil	Rp.22.622.000,-	Rp.22.063.700.-	97,62%		
			1) Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		6 Perusahaan	6 Perusahaan (UMKM)			
					Rp.22.622.000,-	Rp.22.063.700,-	97,62%		
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	31,5%	52,49%			
					Rp.22.266.000,-	Rp.21.868.000,-	98,21%		
			Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pelayanan antar kerja di daerah kab/kota	100%	100%			
					Rp.22.266.000,-	Rp.21.868.000,-	98,21%		
			1) Pelayanan antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	50 orang	206 Orang AK1 Verifikasi Berkas CPMI 4 Orang Pengesahan Perjanjian Penempatan 4 Orang Pencatatan Perjanjian PKWT 9 Perusahaan			
					Rp.22.622.000,-	Rp.21.868.000,-	98,21%		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	REALISASI	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	Permasalahan	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase Penyelesaian Hubungan Industr	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang Menerapkan tata kelola perusahaan yang layak	1,17%	0,3 %			
					Rp. 20.000.000,-	Rp.19.644.900,-	98,22%		
		Persentase kepesertaan bpjs tenaga kerja	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi Dalam satu Daerah Kab/Kota.	Persentase terlaksananya Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk yang mempunyai wilayahbkerja lebih dari 1(satu) Kab/Kota	100%	100%			
					Rp.20.000.000,-	Rp.19.644.900,-	98,22%		
			1)Pengesahan Peraturan Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar diWLKP Online (Perusahaan)	2 Perusahaan	6 Perusahaan			
					Rp.20.000.000,-	Rp.19.644.900,-	98,22%		
			Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan	Persentase terlaksanya Kegiatan Pencegahan dan	100%	100%			
					Rp.1200.000.000,-	Rp.1.199.474.500,-	99,96%		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	REALISASI	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	Permasalahan	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Hubungan Industrial,Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.	penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah provinsi					
			1) Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB,Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	6000 Orang	7900 Orang			
					Rp.1.200.000.000,-	Rp.1.199.474.500,-	99,96%		

Untuk melaksanakan Kegiatan-kegiatan tersebut di atas telah ditetapkan anggaran tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Belanja Tidak Langsung ditetapkan sebesar Rp. 259.018.200,- (sebelum Perubahan) dan setelah Anggaran Perubahan sebesar Rp. 254.845.100,-
- b. Belanja Langsung ditetapkan sebesar Rp. 8.199.140.800,- dan setelah Anggaran Perubahan sebesar Rp. 8.829.714.900,-

Tabel 3.9
Anggaran 2024

No	URAIAN	ANGGARAN 2024		REALISASI	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6
1	BELANJA	Rp.8.458,159.000,-	9.084.560.000,-	Rp.8.692.687.754,-	
	A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp.259.018.200	Rp. 254.845.100,-	Rp.244.045.100,-	
	BELANJA MODAL TANAH	Rp.200.000,000,-	Rp.190.000.000,-	Rp.180.000,000,-	
	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	Rp.59.018.200,-	Rp. 64.845.100,-	Rp.64.045.100,-	
	B. BELANJA LANGSUNG	Rp. 8.199.140.800 ,- Rp.2.387.999.000,-	Rp.8.829.714.900 ,- Rp.2.372.600.000,-	Rp.8.204.629.454,- Rp. 2.259.681.773,-	
	BELANJA PEGAWAI	Rp.5.791.141.800,-	Rp.6.437.114.900	Rp.5.924.983.681,-	
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp.20.000.000,-	Rp.20.000.000,-	Rp.19.964.000,-	
	BELANJA HIBAH				
	SURPLUS/ (DEVISIT)	Rp. 8.458.159.000 ,-	Rp.9.084.560.000,-	Rp.8.692.687.754,-	96.80%

3. Kinerja pelayanan Bidang Perindustrian dan Ketenagakerjaan

Pada Tahun 2024 telah terbit Kebijakan yang diambil meliputi kebijakan peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah yang menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. laporan tentang kebijakan sebagai berikut:

- a. Daftar Nama Penerima Pembiayaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan Nomor 183/IV/Tahun 2024 tentang Penerima Pembiayaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan;

- b. Daftar Nama Penerima Bantuan Peralatan Nomor 481/X/Tahun 2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Peralatan Kerja Pada Kegiatan Pelatihan Pengolahan Kelapa Terpadu Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2024;
- c. Daftar Nama Penerima Bantuan Peralatan Perbengkelan Nomor 505/XI/Tahun 2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pada Kegiatan Pengadaan Bantuan Peralatan Perbengkelan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2024;
- d. Daftar Nama Penerima Bantuan Peralatan Nomor 526/XI/Tahun 2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Peralatan Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi pada Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- e. Penerima Hibah Mesin Peralatan Air Minum Dalam Kemasan Nomor 479.a/X/Tahun 2024 tentang Penetapan Penerima Hibah Mesin Peralatan Air Minum Dalam Kemasan Pada Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri Dinas Perindustrian Dan Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2024.
- f. Penerima Hibah Mesin Penggiling Jagung Nomor 558.a/XI/Tahun 2024 tentang Penetapan Penerima Hibah Mesin Penggiling Jagung Pada Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri Dinas Perindustrian Dan Ketengakerjaan Tahun Anggaran 2024
- g. Penerima Hibah Mesin Pengolahan Kelapa Terpadu Nomor 405.a/IX/Tahun 2024 tentang Penetapan Penerima Hibah Mesin Pengolahan Kelapa Terpadu Pada Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri Dinas Perindustrian Dan Ketengakerjaan Tahun Anggaran 2024
- h. Penerima Bantuan Mesin Industri Kelapa Terpadu Nomor 582.b/XII/Tahun 2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Mesin Industri Kelapa Terpadu Pada Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2024.
- i. Penerima Bantuan Bahan Baku Pandai Besi Nomor 388/VIII/Tahun 2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Bahan Baku Pandai Besi

pada Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2024.

- j. Penerima Hibah Peralatan Pertukangan Nomor 391/IX/Tahun 2024 tentang Penetapan Penerima Hibah Peralatan Pertukangan Pada Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri Dinas Perindustrian Dan Ketengakerjaan Tahun Anggaran 2024
- k. Penerima Hibah Mesin Penyulingan Minyak Atsiri Nomor 582.c/XII/Tahun 2024 tentang Penetapan Penerima Hibah Mesin Penyulingan Minyak Atsiri Pada Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri Dinas Perindustrian Dan Ketengakerjaan Tahun Anggaran 2024
- l. Penerima Hibah Mesin Penyulingan Sereh Nomor 582.a/XII/Tahun 2024 tentang Penetapan Penerima Hibah Mesin Penyulingan Sereh Pada Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri Dinas Perindustrian Dan Ketengakerjaan Tahun Anggaran 2024

BAB IV

PENUTUP

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sangat diperlukan dalam hal mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap publik dan kepada pimpinan.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar sudah berupaya dengan optimal dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi sehingga presentase tingkat pencapaian target sasaran dengan nilai target masih jauh dari harapan. Berikut Kendala yang dihadapi :

1. Kendala Perindustrian

- a. Kurangnya pelaksanaan pendataan terhadap pelaku IKM sehingga data yang dimiliki tidak update.
- b. Kurangnya koordinasi dengan instansi penerbitan PIRT dalam hal ini PTSP yang mengeluarkan perizinan dan dievaluasi oleh Dinkes
- c. Terbatasnya waktu untuk meninjau pelaku usaha (kurangnya SDM sehingga dalam pembuatan akun perusahaan membutuhkan waktu beberapa hari).

2. Ketenagakerjaan

- a. Telah disusun Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro namun sampai sekarang belum ada perusahaan yang menyusun RTK.
- b. Fasilitas Pelatihan belum memadai dikarenakan Bantuan Peralatan diberikan oleh Kementerian sehingga bantuan peralatan tidak dapat diintervensi.
- c. Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan, banyak peserta yang tidak menyelesaikan pelatihan dan kehadiran peserta tidak memenuhi target.

3. Solusi

Guna mencapai target kinerja sasaran organisasi dan menghadapi berbagai kendala yang dihadapi, berbagai upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain :

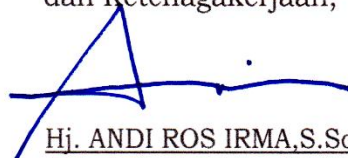
- d. Melakukan Penataan SDM sesuai dengan potensi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur;
- e. Melakukan pembenahan pada setiap kegiatan berbasis aplikasi sehingga pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan lebih efisien;
- f. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal dan vertikal dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi;
- g. Peningkatan fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi melalui pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan.
- h. Untuk memenuhi bantuan peralatan yang tidak memadai maka dapat dilakukan koordinasi dan pengajuan kembali kebutuhan peralatan untuk pelatihan.
- i. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kehadiran peserta dan perserta yang tidak menyelesaikan pelatihan adalah dengan membuat pernyataan integritas peserta.
- j. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi lahan untuk Kawasan industri belum siap dengan menghimbau kepemilik lahan untuk melengkapi dokumen kepemilikan lahannya.
- k. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kurangnya pelaksanaan pendataan terhadap pelaku IKM adalah melakukan kegiatan pendataan (peninjauan langsung ke lokasi IKM) untuk mengetahui dan mencocokkan kesesuai data yang dimiliki dengan yang berlaku sekarang.
- l. Setiap pelaku usaha yang akan mengajukan permohonan PIRT terlebih dahulu diarahkan ke Bidang Industri untuk melakukan pendaftaran SIINAS serta membuat rekomendasi pengajuan PIRT, agar data yang dimiliki di Bidang Industri selaras dengan data pada PTSP dan Dinas Kesehatan.

- m. Mengadakan sosialisasi terkait penggunaan SIINAS terhadap pelaku usaha dan penerapannya untuk kegiatan pelaporan produksi perusahaan dan bagi operator yang ditunjuk agar diikutkan pada bimtek yang diadakan pemerintah provinsi, sehingga mengetahui informasi terbaru pada Akun SIINAS maupun SIIDA.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 masih jauh dari harapan. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun guna perbaikan penyusunan di masa mendatang kami sangat kami harapkan. Semoga Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, dan semoga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026 adalah ***“Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”*** dapat tercapai.

Benteng, 6 Januari 2025

Kepala Dinas Perindustrian
dan Ketenagakerjaan,



Hj. ANDI ROS IRMA, S.Sos.

Pangkat : Pembina Tingkat I

NIP. 19701001 199203 2 013

